



PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN ENERGI

**Temu Konsultasi Triwulanan I - 2017
Bappenas dengan Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia**

Jakarta, 13 Januari 2017

SASARAN POKOK DAN EVALUASI CAPAIAN PN KETAHANAN ENERGI TAHUN 2015-2019 (1/2)

SASARAN	2014	2015		2016		2017	2018	2019	Perkiraan Capaian
	(baseline)	(target)	(realisasi)	(target)	(realisasi)				
1. Produksi Sumber Daya Energi:									
a. Minyak Bumi (ribu BM/hari)**	818	825	779	820	820,3	750/815**	730	700/580**	
b. Gas Bumi (ribu SBM/hari)**	1.224	1.221	1.189	1.150	1.181,5	1.150	1.180	1.295	
c. Batubara (juta ton)	421	425	461	419	253,04 (Sep)	413	406	400	
2. Penggunaan Dalam Negeri (DMO):									
a. Gas Bumi Dalam Negeri (%)	53	50	56	56	59	62	63	64	
b. Batubara Dalam Negeri (%)	24	23	20	20	27	26	32	60	
3. Listrik									
a. Rasio Elektrifikasi (%)	81,5	83,2	88,3	90,15	89,9 (Sep)	92,7	93,9	96,6	
b. Konsumsi Listrik Perkapita (kWh)	843	914	918	985	947,7 (Ags)	1.058	1.129	1.200	
c. Kapasitas Pembangkit (GW)	50,7	53,5	55,5	61,5	57,6 (Okt)	67,4	76,2	86,6	

Catatan: *) Perkiraan capaian 2016



Sudah tercapai/on track/on trend (>90%)



Perlu kerja keras (60-90%)



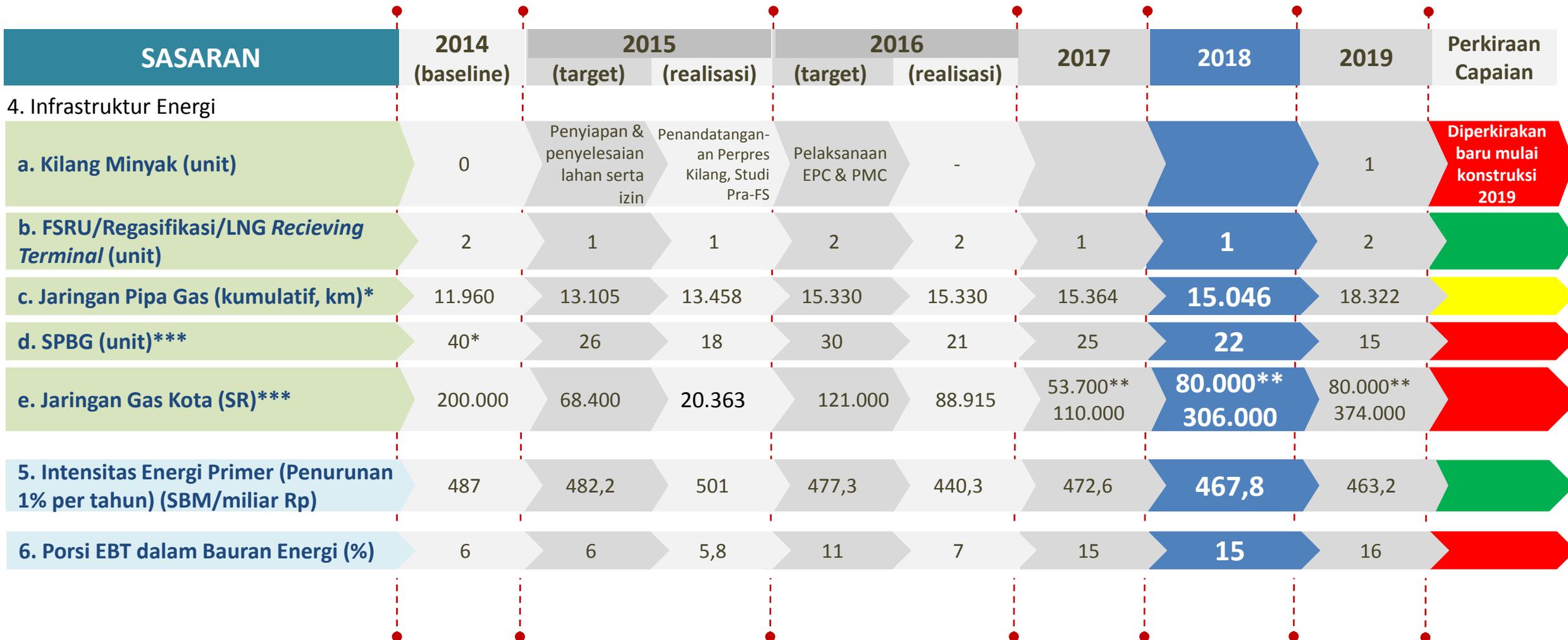
Sangat sulit tercapai (<60%)

Keterangan

* Perkiraan capaian pada akhir 2016

** Produksi Migas sesuai Asumsi Makro dari Kedepatian Bidang Ekonomi

SASARAN POKOK DAN EVALUASI CAPAIAN PN KETAHANAN ENERGI TAHUN 2015-2019 (2/2)



Keterangan

*) Kumulatif

***) APBN

****) Termasuk BUMN

 Sudah tercapai/on track/on trend (>90%)

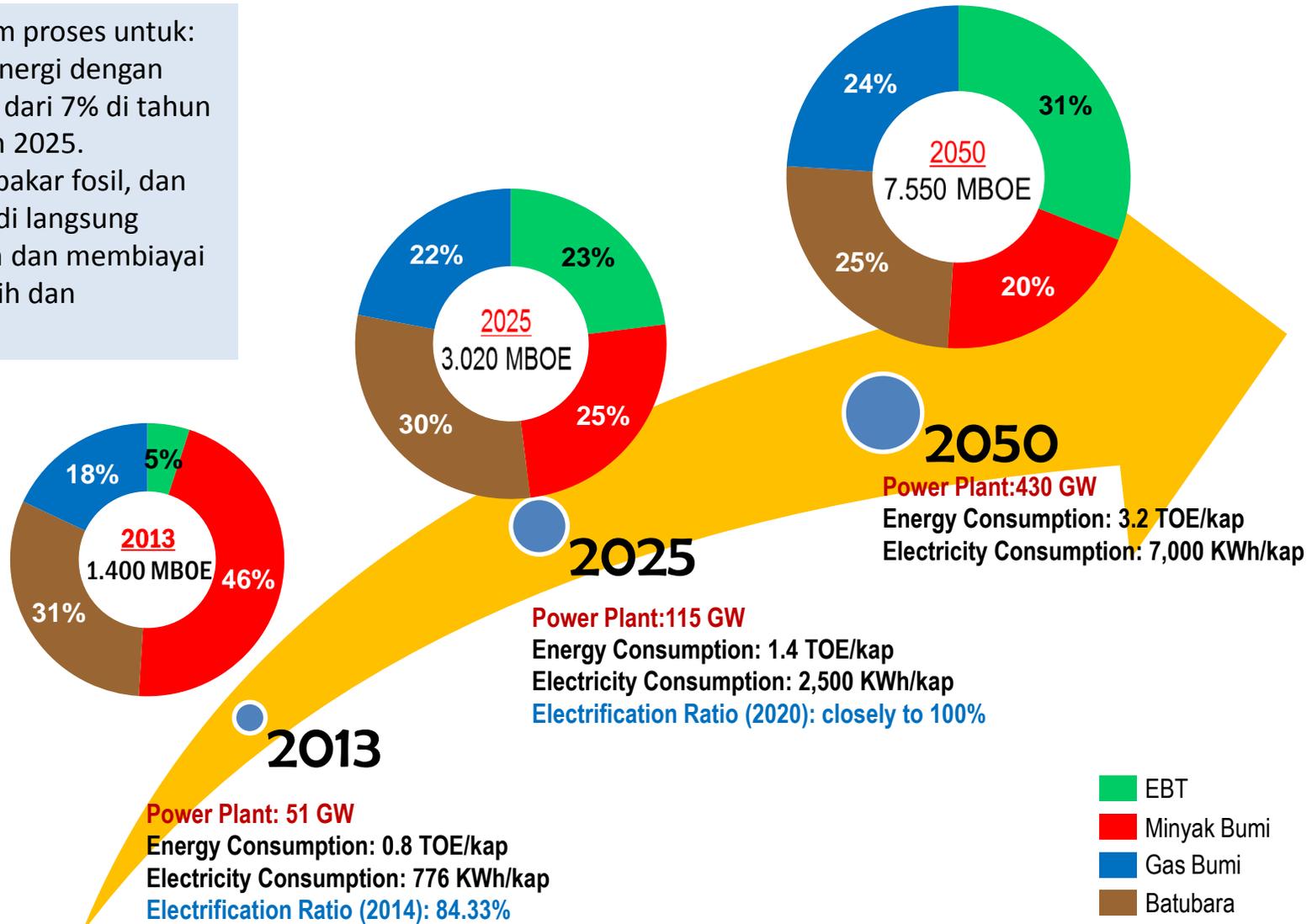
 Perlu kerja keras (60-90%)

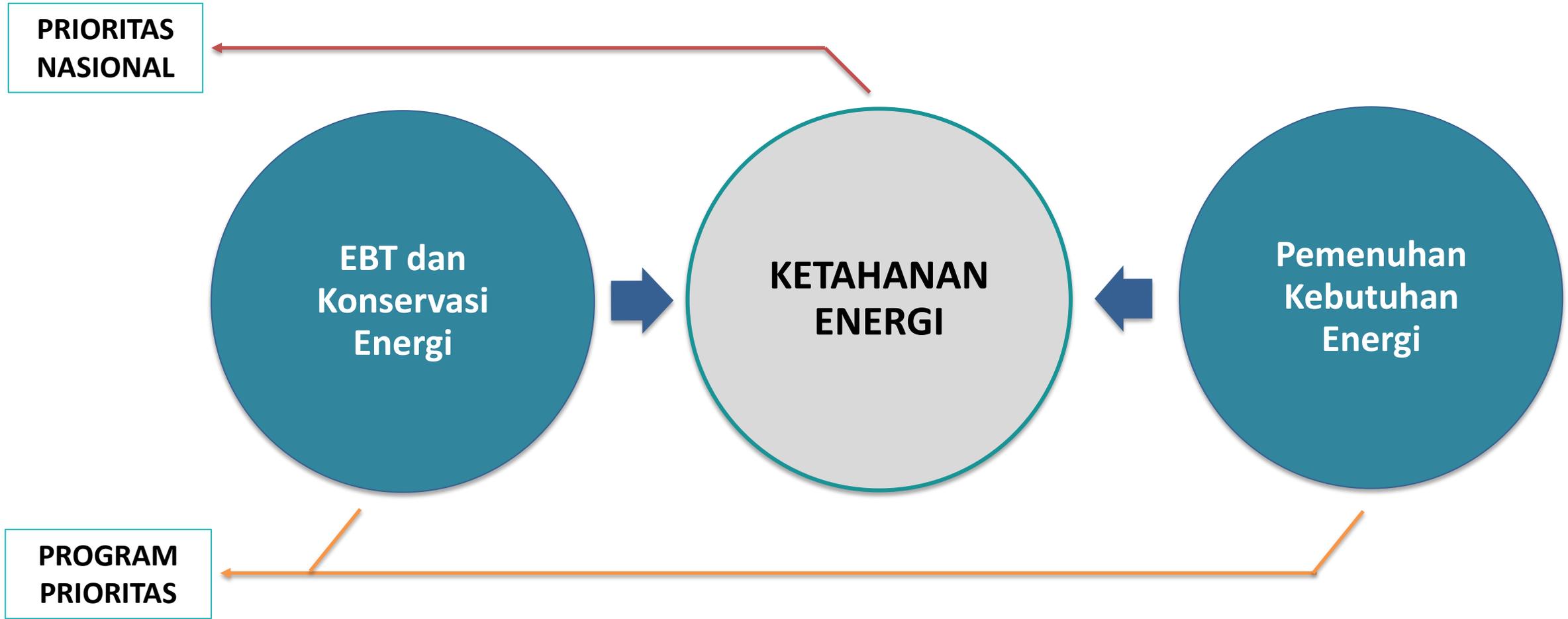
 Sangat sulit tercapai (<60%)

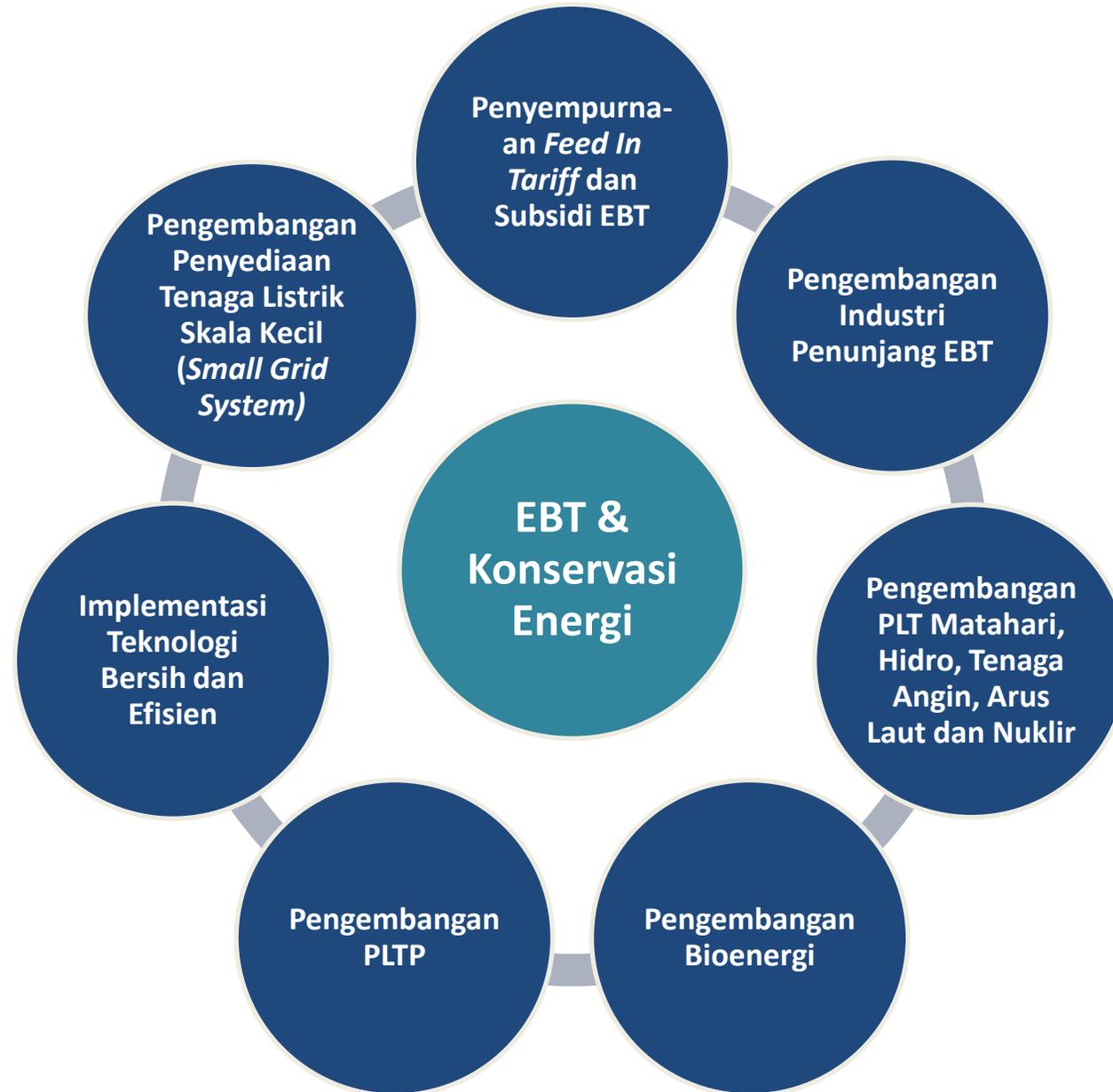
TARGET KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

Indonesia saat ini sedang dalam proses untuk:

- Menyeimbangkan bauran energi dengan meningkatkan peranan EBT dari 7% di tahun 2015, menjadi 23% di tahun 2025.
- Mengurangi subsidi bahan bakar fosil, dan mengalihkan menjadi subsidi langsung kepada yang membutuhkan dan membiayai pengembangan energi bersih dan terbarukan.





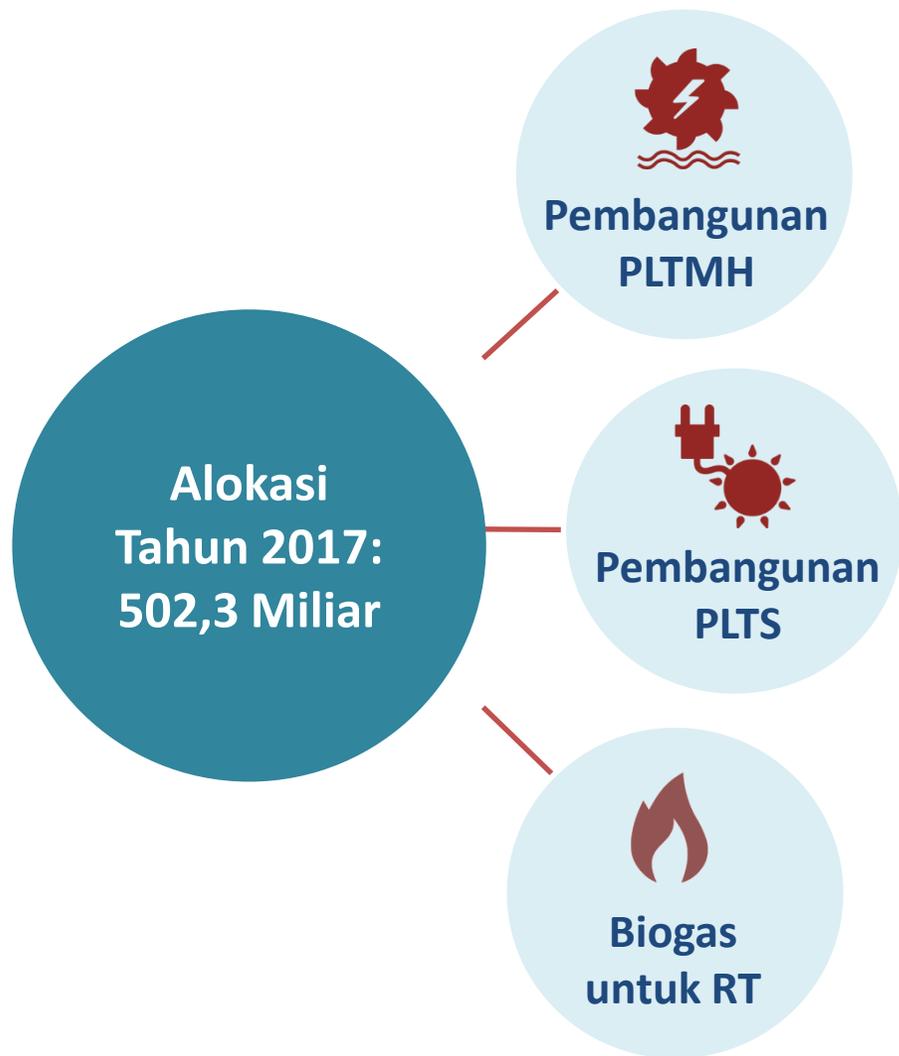




NO	DAK PENUGASAN	KEGIATAN
1.	Rehabilitasi sekolah dasar	Rehabilitasi ruang kelas/laboratorium
2.	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan vokasi dan latihan ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan alat pendidikan vokasi dan balai latihan ketenaga kerjaan ▪ Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan vokasi dan balai latihan ketenagakerjaan
3.	Peningkatan kapasitas infrastruktur kesehatan dasar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan farmasi dan alat kesehatan ▪ Pembangunan dan rehabilitasi berat Puskesmas
4.	Pasar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan pasar ▪ Pembangunan gudang
5.	Penyediaan sarana prasarana air minum dan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan sarana dan prasarana air minum ▪ Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi
6.	Irigasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rehabilitasi irigasi sekunder ▪ Rehabilitasi irigasi tersier
7.	Jalan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan dan peningkatan jalan provinsi ▪ Pembangunan dan peningkatan jalan Kabupaten/Kota
8.	Energi Skala Kecil	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Skala Kecil : Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Biogas untuk rumah tangga

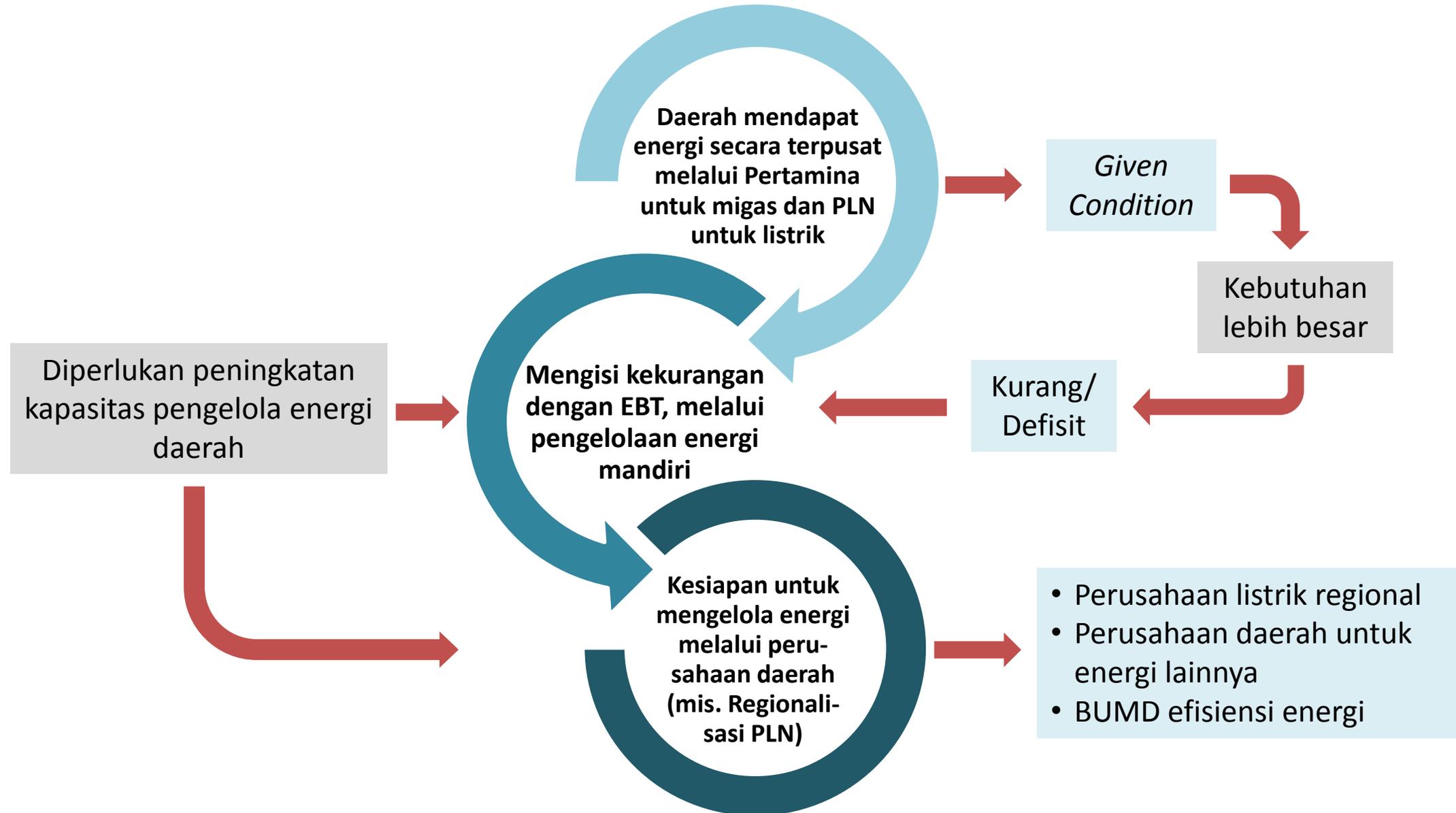
1. **DAK Penugasan terkait dengan penekanan RKP 2018**
 - **Ditentukan hingga lokus/ruas**
 - **Lebih bersifat *top-down***
2. **Kegiatan DAK lainnya menjadi bagian kegiatan dari DAK Reguler/Afirmasi**
 - **Menjaga kesinambungan dengan DAK 2017**
 - **Lebih bersifat kebutuhan daerah (*bottom up*)**

DAK PENUGASAN ENERGI SKALA KECIL TA 2017



ARAH KEBIJAKAN	Membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas Nasional Kedaulatan Energi dengan menu terbatas dan lokus yang ditentukan.
TARGET DAN SASARAN	Peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 92,75% di tahun 2017 dan 96,6% di tahun 2019 melalui energi baru terbarukan yang berada di daerah tertinggal, lokasi prioritas di kabupaten perbatasan negara, daerah kepulauan dan daerah transmigrasi.
RUANG LINGKUP/MENU KEGIATAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan PLTMH ▪ Pembangunan PLTS ▪ Pembangunan Biogas
LOKASI PRIORITAS	Daerah-daerah yang belum akan dibangun jaringan listrik PLN selama 3-5 tahun ke depan (<i>off-grid</i>), khususnya: daerah tertinggal, lokasi prioritas di kabupaten perbatasan negara, daerah kepulauan dan daerah transmigrasi.
KRITERIA TEKNIS/PENILAIAN	Mengacu pada kriteria teknis/penilaian yang sudah digunakan oleh KESDM.
KEBUTUHAN PENDANAAN	Pagu DAK Energi Skala Kecil Rp 502,3 M untuk 24 Provinsi berdasarkan penilaian usulan dan penetapan alokasi per provinsi.
KELEMBAGAAN	Pengelola DAK di pemerintah pusat adalah KESDM dan pelaksana di daerah adalah pemerintah provinsi.

PERAN DAERAH DALAM PENYEDIAAN ENERGI



BAGAIMANA MERUMUSKAN PERAN DAERAH





Penyusunannya telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan RUEN dimana di dalamnya termasuk penyusunan RUED.



Sebagai 'alat' sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, sehingga penganggaranyapun dapat dilakukan secara lebih baik.



Membantu kesiapan provinsi untuk mengusulkan kegiatan pembangunan energi yang akan diusulkan melalui APBN (PLT Minihidro, PLTS)



Alat monitoring pembangunan energi di daerah oleh kementerian dan lembaga.



Terima Kasih

**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)**

Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat, 10310, Indonesia
Email : dit.esdmp@bappenas.go.id

